



PT. BPR DHARMA INDRA

# LAPORAN

## PENERAPAN

### TATA KELOLA

Tahun 2023

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**



🏠 JALAN SOEKARNO HATTA NO 8-10 SUKODONO , LUMAJANG  
☎ 0334-88187  
📠 (0334) 892228



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Dharma Indra mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Dharma Indra beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Melindungi kepentingan stakeholder.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DHARMA INDRA**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Dharma Indra berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Dharma Indra dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : YETI KUSWINDARYANTI,SE,M.H.</p> <hr/> <p>NIK :</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menyusun rencana RBB &amp; menetapkan kebijakan BPR sesuai dgn arahan Dekom.2. Bertanggungjawab ats pelaksanaan kepengurusan BPR &amp; penerapan Tata kelola pd stp kegiatan usaha BPR.3.Menindaklanjuti temuan audit &amp; memastikan SDM yg memadai. 4.Mempertanggungjawabkn pelaksanaan tugasnya kpd pemegang saham dlm RUPS.5. Mengungkapkn kebijakn BPR dibidang kepegawaian &amp; dilarang menggunakan penasihat/konsultan kec.memenuhi syarat.6. Menyediakn data &amp; informasi yg akurat, relevan &amp; tepat waktu ke Dekom.7.Memiliki &amp; melaksanakan pedoman serta tatib kerja Direksi yg mencantumkan etika kerja,waktu kerja &amp; peraturn rapat.8.Menyusun kebijakn &amp; pedoman penerapan Menrisk yg terdiri dari Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi &amp; Startegik.9.Mengevaluasi &amp; memutuskn transaksi yg memerlukan persetujuan Direksi.10.Mengembangkan budaya Menrisk pd seluruh jenjang organisasi. 11.Memastikan peningkatan kompetensi SDM &amp; fungsi Menrisk telah beroperasi secara independen.12.Bertanggungjawab ats pelaksanaan kebijakan Menrisk dan eksposur risiko yg diambil BPR secara keseluruhan.13. Memastikan BPR telah memiliki kebijakan &amp; prosedur penerapan program APUPPT &amp; PPPSPM yang diusulkan kpd Dekom serta telah diterapkan oleh BPR.14.Melakukan pengawasan ats kepatuhan unit kerja dlm menerapkan program APUPPT &amp; PPPSPM.15. Memastikan kebijakan &amp; prosedur terkait penerpan program APUPPT &amp; PPPSPM sejalan dgn perubahan &amp; pengembangan produk,jasa &amp; teknologi BPR.16.Memastikan seluruh pegawai mengikuti pelatihan terkait penerapan program APUPPT &amp; PPPSPM.17. Menetapkan rencana pengembangan &amp; pengadaan TI BPR.18.Menetapkan kebijakan &amp; prosedur terkait penyelenggaraan TI yang memadai serta diterapkan secara efektif.19. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan TI.20.Memastikan bahwa TI mendukung perkembangan usaha &amp; tujuan</p>



		BPR, terdapat peningkatan kompetensi SDM, & tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi yg efektif.21.Mengawasi & mengkoordinir keg ops,krdt, & meningkatkn TKS BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SITI FATIMAH,SE
	NIK	:
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Menetapkkn langkah untk memastikn BPR tln mmenuhi sluruh peraturrn OJK & peraturrn lain dlm rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 2.Memantau & menjaga agr kegiatn usaha BPR tdk menyimpang dr peraturrn OJK.3.Menyusn & mengkinikn pedoman kerja, sistem & prosedur kepatuhan.4.Mencegah Direksi melakukn penyimpangan trhdp peraturrn OJK dan peraturrn perundangn lainnya.5. Melaporkn pelaksanaan tugas & tanggungjawab scara berkala kpd Dirut dgn tembusan kpd Dekom.6. Memastikn BPR memiliki kebijakan & prosedur penerapan program APUPPT & PPPSPM dan mengusulkannya kpd Dekom serta diterapkn sesuai dgn kebijakan & prosedur.8. Membentuk UKK APUPPT & PPPSPM dan menunjuk pejabat penanggungjawabnya.9. Melakukn pengawasan ats kepatuhan unit kerja dlm menerapkn progam APUPPT & PPPSPM.10. Memastikn kebijakn & prosedur sejalan dgn perubahn dan perkembangan produk,jasa & teknologi diBPR.11.Memastikn bahwa sluruh pegawai mengikuti pelatihan yg berkaitan dgn penerpan program APUPPT & PPPSPM.12.Menetapkn wewenang & tanggungjawab yg jelas pd stp jenjang jabatan terkait penerapan Menrisk.13.Menyusn kebijakn & pedoman penerapan Menrisk.14. Mengevaluasi & memutuskn transaksi yg membutuhkn persetujuan Direksi.15. Mengembangkn budaya Menrisk pd seluruh jenjang organisasi.16.Memastikn peningkatan kompetensi SDM terkait Menrisk & fungsi Menrisk telah beroperasi scra independen.17. Bertanggungjwb ats pelaksanaan kebijakn Menrisk & eksposur Risiko yg diambil BPR scra keseluruhan.18.Memastikan penerapan Tata Kelola pd setiap kegiatan usaha BPR.19. Menindaklanjuti temuan audit & memastikn jumlah SDM yg memadai.20. Mempertanggungjwbkn tugasnya kpd pemegang saham dlm RUPS.21. Mengungkapkn kebijakan BPR dibidang kepagawaian.22.Menyediakan data & informasi yg akurat,relevan,dan tpt waktu kpd Dekom.23.Memiliki & melaksanakn pedoman & tatib kerja Direksi yg mencantumkan etika kerja,waktu kerja & peraturan rapat.24. Menetapkn kebijakan & prosedur TI.25. Bertanggungjwb ats kepatuhn pelaksanaan ketentuan Perlindungan Konsumen.



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
Direksi PT BPR Dharma Indra telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, yaitu : Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat, melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang, serta memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : FY RUDDY PRIHANANTO</p> <hr/> <p>NIK :</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Mengawasi pelaksanaan tugas Dirut dlm mengelola BPR.2.Memberikan arahan kebijaksanaan terhadap rencana kerja yg dibuat Direksi.3.Mengevaluasi realisasi pelaksanaan RBB dan tugas lain terkait pengelolaan BPR.4.Meriksa dan memberi petunjuk kpd Dirut terkait pemberian kredit dan hubungan kerja dgn instansi lain.5. Mengkaji, memproses &amp; memutuskan tindakan sehubungan dgn program kerja serta usulan yg diajukan Dirut.6.Memberikan evaluasi terhdp likuiditas,solvabilitas &amp; profabilitas perusahaan scr periodik.7.Menyusun Laporan RRBB pd stp semester serta lap. Lain oleh OJK. 8.Menyusun Laporan hasil evaluasi &amp; pengawasn ats pengelolaan BPR trhdp kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK terkait Perlindungan Konsumen.9.Melakukn pengawasn ats pelaksanaan tanggung jawab Direksi.10.Memastikan,memberikn persetujuan dan melakukn evaluasi ats kebijakan dan prosedur yg dibuat BPR terkait penerapan program APUPPT &amp; PPPSPM.11. Melakukn pengawasan terkait pelaksanaan tanggung jawab Direksi trhd penerapn program APUPPT &amp; PPPSPM.12.Memastikn adanya pembahasan terkait PU PPT &amp; PPSPM dalam rapat Direksi dan Dekom.13. Bertanggungjawab ats hasil pengawasan &amp; evaluasi pelaksanaan tugas Direksi kpd RUPS. 14.Melaksanakan tugas &amp; tanggungjawabnya secara independent.15.Memastikn terselenggaranya penerapan Tata Kelola pd stp kegiatan usaha BPR.16.Mengarahkn, memantau &amp; mengevaluasi pelaksanaan kebijakn strategis BPR.17.Memastikn bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit.18. Melaksanakn pedoman &amp; tatib kerja Dekom yang memuat etika kerja,waktu kerja dan peraturan rapat.19.Melakukn rapat Dekom paling sdkit 1 kali dlm 3 bln &amp; dihadiri oleh</p>



		seluruh Dekom.20.Mengungkapkan kepemilikan sham, hubungan keuangan & hubungan keluarga dgn Anggota Dekom. Direksi dan pemegang saham.21.Menyetujui & mengevaluasi kebijakan Menrisk.22.Memastikan & mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi ats pelaksanaan kebijakan Menrisk.23. Mengevaluasi & memutuskan permohonan Direksi berkaitan dgn transaksi yg memerlukan persetujuan Dekom.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ESTI RAHAYU,SE
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Mengawasi pelaksanaan tugas Dirut dlm mengelola BPR.2.Memberikan arahan kebijaksanaan terhadap rencana kerja yg dibuat Direksi.3.Mengevaluasi realisasi pelaksanaan RBB dan tugas lain terkait pengelolaan BPR.4.Meriksa dan memberi petunjuk kpd Dirut terkait pemberian kredit dan hubungan kerja dgn instansi lain.5. Mengkaji, memproses & memutuskan tindakan sehubungan dgn program kerja serta usulan yg diajukan Dirut.6.Memberikan evaluasi terhdp likuiditas,solvabilitas & profabilitas perusahaan scr periodik.7.Menyusun Laporan RRBB pd stp semester serta lap. Lain oleh OJK. 8.Menyusun Laporan hasil evaluasi & pengawasn ats pengelolaan BPR trhdp kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK terkait Perlindungan Konsumen.9.Melakukan pengawasn ats pelaksanaan tanggung jawab Direksi.10.Memastikan,memberikn persetujuan dan melakukn evaluasi ats kebijakan dan prosedur yg dibuat BPR terkait penerapan program APUPPT & PPPSPM.11. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tanggung jawab Direksi trhd penerapn program APUPPT & PPPSPM.12.Memastikn adanya pembahasan terkait PU PPT & PPSPM dalam rapat Direksi dan Dekom.13. Bertanggungjawab ats hasil pengawasan & evaluasi pelaksanaan tugas Direksi kpd RUPS. 14.Melaksanakan tugas & tanggungjawabnya secara independent.15.Memastikn terselenggaranya penerapan Tata Kelola pd stp kegiatan usaha BPR.16.Mengarahkn, memantau & mengevaluasi pelaksanaan kebijakn strategis BPR.17.Memastikn bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit.18. Melaksanakn pedoman & tatib kerja Dekom yang memuat etika kerja,waktu kerja dan peraturan rapat.19.Melakukan rapat Dekom paling sdkit 1 kali dlm 3 bln & dihadiri oleh seluruh Dekom.20.Mengungkapkan kepemilikan sham, hubungan keuangan & hubungan keluarga dgn Anggota Dekom. Direksi dan pemegang saham.21.Menyetujui & mengevaluasi kebijakan Menrisk.22.Memastikan



		& mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi ats pelaksanaan kebijakan Menrisk.23. Mengevaluasi & memutuskan permohonan Direksi berkaitan dgn transaksi yg memerlukan persetujuan Dekom.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: EDDY JUSWONO WIJONO
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:	<p>1. Mengawasi pelaksanaan tugas Dirut dlm mengelola BPR.2.Memberikan arahan kebijaksanaan terhadap rencana kerja yg dibuat Direksi.3.Mengevaluasi realisasi pelaksanaan RBB dan tugas lain terkait pengelolaan BPR.4.Meriksa dan memberi petunjuk kpd Dirut terkait pemberian kredit dan hubungan kerja dgn instansi lain.5. Mengkaji, memproses &amp; memutuskan tindakan sehubungan dgn program kerja serta usulan yg diajukan Dirut.6.Memberikan evaluasi terhdp likuiditas,solvabilitas &amp; profabilitas perusahaan scr periodik.7.Menyusun Laporan RRBB pd stp semester serta lap. Lain oleh OJK. 8.Menyusun Laporan hasil evaluasi &amp; pengawasn ats pengelolaan BPR trhdp kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK terkait Perlindungan Konsumen.9.Melakukan pengawasn ats pelaksanaan tanggung jawab Direksi.10.Memastikan,memberikn persetujuan dan melakukn evaluasi ats kebijakan dan prosedur yg dibuat BPR terkait penerapan program APUPPT &amp; PPPSPM.11. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tanggung jawab Direksi trhd penerapn program APUPPT &amp; PPPSPM.12.Memastikn adanya pembahasan terkait PU PPT &amp; PPSPM dalam rapat Direksi dan Dekom.13. Bertanggungjawab ats hasil pengawasan &amp; evaluasi pelaksanaan tugas Direksi kpd RUPS. 14.Melaksanakan tugas &amp; tanggungjawabnya secara independent.15.Memastikn terselenggaranya penerapan Tata Kelola pd stp kegiatan usaha BPR.16.Mengarahkn, memantau &amp; mengevaluasi pelaksanaan kebijakn strategis BPR.17.Memastikn bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit.18. Melaksanakn pedoman &amp; tatib kerja Dekom yang memuat etika kerja,waktu kerja dan peraturan rapat.19.Melakukan rapat Dekom paling sikit 1 kali dlm 3 bln &amp; dihadiri oleh seluruh Dekom.20.Mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan &amp; hubungan keluarga dgn Anggota Dekom. Direksi dan pemegang saham.21.Menyetujui &amp; mengevaluasi kebijakn Menrisk.22.Memastikan &amp; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi ats pelaksanaan kebijakan Menrisk.23. Mengevaluasi &amp; memutuskan permohonan Direksi berkaitan dgn transaksi yg memerlukan persetujuan Dekom.</p>



Rekomendasi Kepada Direksi
<p>Agar Direksi lebih mengoptimalkan pertumbuhan kredit yang lebih berkualitas.</p> <p>Agar Direksi melakukan kaji ulang secara mendalam atas penyaluran dana melalui Fintech dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Agar Direksi meningkatkan mutu dan kompetensi SDM seluruh karyawan BPR dan khususnya bagi Pejabat Eksekutif yang belum mengikuti sertifikasi kompetensi dibidangnya.</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> <p>Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking guna memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p> <p>Agar Direksi menjaga hubungan baik dengan nasabah untuk menciptakan kepercayaan nasabah kepada bank.</p>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p>Komite Audit</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p>

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE,M.H.		-	-
2	SITI FATIMAH,SE		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE,M.H.		600924	PT BPR ANTAR PARAMA	-
2	SITI FATIMAH,SE		600924	PT BPR ANTAR PARAMA	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE, M.H.		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SITI FATIMAH,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE, M.H.		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SITI FATIMAH,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	FY RUDDY PRIHANANTO		-	-
2	ESTI RAHAYU,SE		-	-
3	EDDY JUSWONO WIJONO		7.720.000.000	85,78%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	FY RUDDY PRIHANANTO		600924	PT BPR ANTAR PARAMA	-
2	ESTI RAHAYU,SE		600924	PT BPR ANTAR PARAMA	-
3	EDDY JUSWONO WIJONO		600924	PT BPR ANTAR PARAMA	42,34%

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	FY RUDDY PRIHANANTO		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ESTI RAHAYU,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	EDDY JUSWONO WIJONO		tidak ada	tidak ada	tidak ada

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	FY RUDDY PRIHANANTO		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ESTI RAHAYU,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	EDDY JUSWONO WIJONO		tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	861.000.000	3	630.000.000
2	Tunjangan	2	0	3	0
3	Tantiem	2	0	3	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	2	160.240.412	3	109.386.418
Total			1.021.240.412		739.386.418

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Nihil	Nihil
2	Transportasi	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 4
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	BPJS Tenaga Kerja dan Pensiun	BPJS Tenaga Kerja dan Pensiun

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,54	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,24	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,49	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,34	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,45	1



## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-3-30	3	Rapat Dewan Komisaris I tahun 2023 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Evaluasi Kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa hasil yang dicapai masih belum memenuhi target RBB tahun 2022 akan tetapi rasio-rasio keuangan masih menunjukkan nilai yang sehat dan laba yang dilakukan masih positif. Komisaris berharap bahwa setiap kegiatan operasional yang dijalankan berpedoman dan mengacu pada RBB tahun 2023 yang sudah dibuat dan target yang belum tercapai pada tahun 2022 akan dapat tercapai pada tahun 2023. 2. Strategi untuk mencapai target RBB semester I tahun 2023 yaitu fokus pada pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah agar target semester I RBB 2023 bisa tercapai. Serta dibutuhkan kerjasama semua unit kerja. 3. Evaluasi mengenai profil risiko (6 risiko) yang terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko strategik. dari ke enam risiko tersebut yang dinilai tingkat risiko inherennya tergolong tinggi adalah risiko kredit dikarenakan salah satu penyebabnya adalah jumlah NPL > 5% dan akan dilakukan kaji ulang setiap triwulan. 4. Evaluasi Penerapan APU PPT dimana Bank telah menyempurnakan pedoman APU dan PPT yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, bank juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan secara berkala, dan bank juga telah melaporkan semua laporan yang terkait dengan APU PPT.
2	2023-6-5	3	Rapat Dewan Komisaris II tahun 2023 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Evaluasi perkembangan kerjasama Fintech yaitu dengan adanya kerjasama fintech komunal sangat membantu bank untuk menaikkan jumlah kredit, akan tetapi bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memilih dan memberikan kredit kepada calon debitur fintech. 2. Isu-isu strategi BPR yang melewati tantangan dengan memperkuat sistem Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Memilih inovasi produk yang mampu bersaing dengan Lembaga Keuangan Lainnya (LJK). 3. Evaluasi/penetapan strategi BPR yaitu adanya kerjasama dengan semua divisi agar rencana bisnis bank dapat tercapai sesuai dengan target yang telah dibuat. 4. Evaluasi terkait Realisasi Rencana Bisnis BPR yaitu meningkatkan jumlah kredit yang diberikan dan mengintensifkan penagihan debitur kolektibilitas 3,4, dan 5 agar jumlah NPL bisa turun dan tercapainya RBB yang telah dibuat.
3	2023-7-12	3	Rapat Dewan Komisaris III tahun 2023 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Pembahasan POJK No.8 Tahun 2023 tentang APU PPT dan PPPSPM yang mana Bank akan selalu memperbaharui kebijakan dan memberikan sosialisasi serta pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan POJK tersebut. 2. Pencapaian Target RBB Semester I Tahun 2023, Dekom menghimbau pencapaian realisasi RBB di semester I masih belum tercapai secara optimal, maka di semester II nanti diharapkan target RBB tahun 2023 akan tercapai. 3. Evaluasi Pelaksanaan Inklusi dan Literasi Keuangan Semester I tahun 2023. Kegiatan Inklusi dan Literasi keuangan pada semester I terlaksana pada bulan Juni 2023 dengan peserta pelajar sekolah dasar. Diharapkan pelaksanaan Inklusi dan Literasi bisa terlaksana semuanya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4	2023-10-2	3	Rapat Dewan Komisaris IV tahun 2023 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Penunjukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan yang berakhir tahun 2023. Dewan Komisaris mengusulkan dan memberikan rekomendasi penunjukan AP/KAP Adi Darmawan, CPA dan KAP Moh Wildan & Adi Darmawan untuk dapat di RUPS kan. 2. Evaluasi Perkembangan Kredit Triwulan III tahun 2023. Dewan Komisaris berpendapat untuk dapat menurunkan jumlah NPL sesuai target RBB sehingga RBB tahun 2023 dapat tercapai. Dewan Komisaris mendukung langkah-langkah Direksi untuk menambah dan meningkatkan jumlah kredit dengan program-program yang ditawarkan oleh Direksi agar target penyaluran dana di RBB dapat tercapai.



5	2023-12-4	3	Rapat Dewan Komisaris V tahun 2023 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2024. Dewan Komisaris menyetujui penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pengembangan BPR. Dewan Komisaris juga sangat optimis target yang dibuat untuk RBB tahun 2024 bisa tercapai secara maksimal. 2. Upaya Pencapaian RBB tahun 2023 diperlukan kerjasama semua bagian dan semua karyawan harus tetap semangat dan optimis agar target bisa tercapai secara maksimal.
---	-----------	---	---

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	FY RUDDY PRIHANANTO		5	0	100,00%
2	ESTI RAHAYU,SE		5	0	100,00%
3	EDDY JUSWONO WIJONO		5	0	100,00%

### I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

### J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

### K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-03-07	Sosial	Pemberian bantuan berupa sembako untuk umat gereja yang kurang mampu	Gereja	1.000.000
2	2023-04-18	Sosial	Pembagian Zakat Fitrah kepada kaum Duafah disekitar kantor PT. BPR Dharma Indra	Kaum Duafah	4.908.000
3	2023-06-03	Sosial	Acara edukasi dan literasi kepada pelajar terkait tabungan SIMPEL	SD Negeri Selokgondang 2	747.500
4	2023-06-06	Sosial	Pemberian bantuan untuk memperingati "hari lingkungan hidup tahun 2023 South Beach FE"	Dinas Lingkungan Hidup	500.000
5	2023-06-19	Sosial	Pemberian bantuan untuk umat gereja yang kurang mampu	Gereja	1.000.000
6	2023-07-21	Sosial	Pemberian bantuan untuk kegiatan bersih desa Tempursari tahun 2023	Kantor Desa Tempursari	200.000
7	2023-07-18	Sosial	Pemberian Sumbangan HUT RI kepada Desa Kutorenon	Kantor Kelurahan Kutorenon	250.000
8	2023-08-19	Sosial	Acara edukasi dan literasi tabungan SIMPEL kepada pelajar SD Negeri Karang Sari 03	SD Negeri Karang Sari 03	506.600
9	2023-07-31	Sosial	Acara edukasi pembukaan tabungan SIMPEL kepada pelajar SD Negeri Kepuharjo 01	SD Negeri Kepuharjo 01	253.440
10	2023-08-04	Sosial	Pemberian sumbangan HUT RI tahun 2023 kepada Desa Tempursari	Kantor Desa Tempursari	250.000
11	2023-11-22	Sosial	Pemberian bantuan untuk peringatan HUT PGRI dan HGN tahun 2023 kecamatan Sukodono Lumajang	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Sukodono	150.000



## M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dharma Indra ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dharma Indra. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dharma Indra ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dharma Indra, Terima Kasih.

LUMAJANG, 31 Januari 2024

Persetujuan Pengurus PT. BPR Dharma Indra

  
EDDY JUSWONO WIJONO  
Komisaris Utama

  
YETI KUSWINDARYANTI, SE, M.H.  
Direktur Utama



Nomor : 018/OPS/DI/I/2024

Lumajang, 31 Januari 2024

Kepada Yth :

**KETUA DPP PERBARINDO**

Komp. Patra II No.46

Jl. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih

Jakarta Pusat

Perihal : **Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment Tahun 2023**

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami bermaksud untuk menyampaikan Laporan Tata Kelola dan Self Assesment tahun 2023.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon untuk dapat diterima dengan baik. Atas perhatian Bapak/ibu kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT. BPR. DHARMA INDRA**



**Yeti Kuswindaryanti, SE,M.H**  
Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT BPR Dharma Indra**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665617-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600886-31012024161200

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

kuswindaryanti@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 16:12:00



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE

LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

NAMA BPR : DHARMA INDRA  
TANGGAL PENERIMAAN : 31/01/2024  
TANGGAL APPROVE : 31/01/2024  
NOMOR SURAT PENERIMAAN : No.5276/GCG/DPP-PERBARINDO/II/2024

Kami atas nama DHARMA INDRA menyatakan bahwa data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Laporan GCG
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak DHARMA INDRA bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Jakarta, 31 Januari 2024

YETI KUSWINDARYANTI

DIREKTUR UTAMA



**PERBARINDO**

**DEWAN PENGURUS PUSAT**

**PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA**

---

**TANDA TERIMA**

No.5276/GCG/DPP-PERBARINDO/II/2024

Kepada Yth,

PT BPR DHARMA INDRA

JL. SOEKARNO HATTA NO. 8 - 10 SUKODONO LUMAJANG PROV. JAWA TIMUR

---

<b>KETERANGAN</b>
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR DHARMA INDRA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 31 Januari 2024

PERBARINDO

---

# MediaBPR

*Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah*

## TANDA TERIMA

No.5276/GCG/Media-BPR/I/2024

Kepada Yth,  
PT BPR DHARMA INDRA  
JL. SOEKARNO HATTA NO. 8 - 10 SUKODONO LUMAJANG PROV. JAWA TIMUR

---

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR DHARMA INDRA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 31 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO